

KEKUASAAN DAN IDEOLOGI DALAM PERNYATAAN TENTANG PENGHAPUSAN PRODI TIDAK RELEVAN DENGAN KEBUTUHAN INDUSTRI

N. Lia Marlina^{1*}, Edi Puryanto², Reni Nur Eriyani³, Jihan Syahira⁴, Amelia Putri⁵,
Poppy Aulia Sutarli⁶

¹²³⁴Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur, 13220, Indonesia

*Alamat email penulis koresponden: nliamarlina2929@gmail.com

Abstrak

Pernyataan Badri Munir Sukoco mengenai penghapusan program studi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan arah kebijakan pendidikan tinggi. Penelitian ini bertujuan menganalisis representasi ideologi dan relasi kekuasaan dalam pernyataan Badri Munir mengenai penghapusan prodi yang tidak relevan dengan kebutuhan industri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough dan teknik dokumentasi dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Kabupaten Badung, Bali, 23 April 2026 berkaitan pernyataan Badri Munir. Analisis dilakukan melalui dimensi teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dan pemilihan bahasa dalam pernyataan Badri Munir membangun legitimasi terhadap kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan industri. Otoritas penutur dan penyebaran turut memperkuat penerimaan wacana oleh masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana membangun ideologi dan relasi kekuasaan dalam kebijakan pendidikan tinggi melalui komunikasi publik. Diharapkan penelitian ini menjadi rekomendasi penelitian selanjutnya yang mengkaji wacana kebijakan pendidikan dengan AWK. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian linguistik, khususnya hubungan antara bahasa, kekuasaan dan ideologi dalam komunikasi publik.

Kata Kunci: kekuasaan, ideologi, analisis wacana kritis, komunikasi publik

Abstract

Badri Munir Sukoco's statement regarding the elimination of study programs that are considered irrelevant to the needs of the industry has become a public concern because it is related to the direction of higher education policy. This study aims to analyze the representation of ideology and power relations in Badri Munir's statement regarding the elimination of study programs that are not relevant to the needs of the industry. This study uses a qualitative descriptive method with Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis approach and documentation techniques in the 2026 National Population Symposium in Badung Regency, Bali, April 23, 2026 related to Badri Munir's statement. The analysis was carried out through the dimensions of text, discursive practices, and social practices. The results of the study show that the use and choice of language in Badri Munir's statement builds legitimacy for policies that are oriented to industry needs. The authority of speakers and dissemination also strengthens the acceptance of discourse by the public. It can be concluded that language does not only function as a means of communication, but also as a means of building ideology and power relations in higher education

policy through public communication. It is hoped that this research will be a recommendation for further research that examines the discourse on education policy with AWK. In addition, this research is expected to contribute to the development of linguistic studies, especially the relationship between language, power and ideology in public communication.

Keywords: power, ideology, critical discourse analysis, public communication

PENDAHULUAN

Bahasa memiliki peran yang penting dalam kehidupan sosial karena tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk cara pandang, menyampaikan kepentingan, serta memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap suatu persoalan. Dalam komunikasi publik, penggunaan bahasa sering dimanfaatkan untuk membangun legitimasi terhadap kebijakan yang akan diterapkan. Oleh karena itu, setiap pernyataan yang disampaikan oleh pejabat publik tidak hanya mengandung informasi, tetapi juga dapat merepresentasikan ideologi dan relasi kekuasaan yang melatarbelakangi lahirnya suatu kebijakan. Menurut Fairclough (2015), bahasa merupakan praktik sosial yang berkaitan erat dengan kekuasaan dan ideologi sehingga makna suatu wacana tidak dapat dipahami hanya dari aspek kebahasaannya, melainkan juga dari konteks sosial yang melingkupinya.

Salah satu wacana yang menarik perhatian publik ialah pernyataan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Badri Munir Sukoco, mengenai kemungkinan penghapusan program studi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Kabupaten Badung, Bali, sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan relevansi pendidikan tinggi terhadap kebutuhan dunia kerja. Dalam pernyataannya, Badri Munir Sukoco menyampaikan bahwa program studi perlu dipilih, dipilah, bahkan ditutup apabila dinilai tidak lagi sesuai dengan kebutuhan industri di masa mendatang. Pernyataan tersebut kemudian memunculkan beragam tanggapan dari kalangan akademisi, perguruan tinggi, mahasiswa, maupun masyarakat karena dinilai menyangkut arah kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia.

Munculnya beragam respons tersebut menunjukkan bahwa suatu kebijakan tidak hanya dipahami sebagai keputusan administratif, tetapi juga sebagai wacana yang dibangun melalui penggunaan bahasa. Pilihan diksi, penyusunan argumentasi,

serta penyampaian data yang digunakan dalam pernyataan tersebut memiliki peran dalam membentuk persepsi masyarakat mengenai fungsi pendidikan tinggi. Haryatmoko (2016) menjelaskan bahwa Analisis Wacana Kritis (AWK) digunakan untuk mengungkap kepentingan, ideologi, dan dominasi yang tersembunyi di balik penggunaan bahasa. Dengan demikian, analisis terhadap pernyataan Badri Munir Sukoco menjadi penting untuk mengetahui bagaimana bahasa digunakan dalam membangun legitimasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan tinggi.

Penelitian mengenai AWK telah banyak dilakukan, terutama pada pidato politik, pemberitaan media massa, maupun komunikasi pejabat publik. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa bahasa berfungsi sebagai instrumen untuk membangun citra, memperoleh legitimasi, serta mempertahankan relasi kekuasaan dalam kehidupan sosial. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji pernyataan Badri Munir Sukoco mengenai penghapusan program studi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri masih sangat terbatas. Padahal, isu tersebut menjadi salah satu wacana pendidikan yang banyak diperbincangkan karena berkaitan dengan hubungan antara perguruan tinggi, kebutuhan industri, dan arah kebijakan pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada objek kajian, yaitu pernyataan Badri Munir Sukoco mengenai penghapusan program studi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri. Penelitian ini menggunakan AWK untuk mengkaji bagaimana ideologi dan relasi kekuasaan direpresentasikan melalui penggunaan bahasa. Analisis dilakukan melalui tiga dimensi, yaitu analisis teks (*text*), praktik diskursif (*discursive practice*), dan praktik sosial (*social practice*). Melalui ketiga dimensi tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana suatu wacana kebijakan pendidikan dibangun, disebarluaskan, serta dimaknai dalam kehidupan sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi ideologi dan relasi kekuasaan dalam pernyataan Badri Munir Sukoco mengenai penghapusan program studi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri melalui perspektif AWK.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami makna yang terkandung dalam suatu wacana, khususnya mengenai representasi ideologi dan relasi kekuasaan dalam pernyataan Badri Munir Sukoco tentang penghapusan program studi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri. Analisis penelitian menggunakan pendekatan AWK yang dikembangkan oleh Fairclough (2015), yaitu melalui tiga dimensi analisis yang meliputi analisis teks (*text*), praktik diskursif (*discursive practice*), dan praktik sosial (*social practice*).

Sumber data penelitian berupa tuturan Badri Munir Sukoco yang disampaikan pada Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Kabupaten Badung, Bali, pada 23 April 2026. Tuturan tersebut dipilih karena memuat wacana mengenai evaluasi hingga kemungkinan penutupan program studi yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan industri, sehingga menimbulkan berbagai respons dari masyarakat dan kalangan akademisi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan mengumpulkan rekaman video, berita, dan transkrip pernyataan Badri Munir Sukoco yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data ditranskripsikan, dibaca secara berulang, kemudian dipilih berdasarkan tuturan yang mengandung unsur ideologi, relasi kekuasaan, serta strategi penggunaan bahasa yang sesuai dengan fokus penelitian. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan sesuai dengan model AWK Fairclough (2015). Tahap pertama ialah analisis teks yang bertujuan mengidentifikasi penggunaan diksi, struktur kalimat, modalitas, dan strategi representasi dalam tuturan. Tahap kedua ialah analisis praktik diskursif untuk mengkaji proses produksi, penyebaran, dan penerimaan wacana di ruang publik. Tahap ketiga ialah analisis praktik sosial yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara wacana dengan konteks sosial, politik, dan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia. Hasil analisis pada ketiga dimensi tersebut kemudian diinterpretasikan untuk mengungkap ideologi dan relasi kekuasaan yang dibangun melalui penggunaan bahasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengumpulan data, ditemukan beberapa tuturan Badri Munir Sukoco yang merepresentasikan ideologi dan relasi kekuasaan dalam wacana penghapusan program studi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri. Data tersebut dianalisis menggunakan AWK melalui tiga dimensi, yaitu analisis teks (*text*), praktik diskursif (*discursive practice*), dan praktik sosial (*social practice*). Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan untuk menjelaskan bagaimana bahasa digunakan sebagai sarana membangun makna, memperoleh legitimasi, serta merepresentasikan kepentingan tertentu dalam kebijakan pendidikan tinggi.

1. Analisis Teks (*Text*)

Analisis teks merupakan tahap awal dalam AWK yang bertujuan mengidentifikasi bagaimana pilihan bahasa digunakan untuk membangun makna dalam suatu wacana. Fairclough (2015) menjelaskan bahwa unsur kebahasaan, seperti pilihan diksi, struktur kalimat, modalitas, dan metafora, tidak pernah bersifat netral karena selalu dipengaruhi oleh kepentingan sosial tertentu. Oleh sebab itu, analisis terhadap tuturan Badri Munir Sukoco difokuskan pada bentuk bahasa yang digunakan untuk merepresentasikan kebijakan penghapusan program studi.

Salah satu tuturan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini ialah sebagai berikut.

"Program studi perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup."

Tuturan tersebut menunjukkan adanya penggunaan tiga verba, yaitu pilih, pilah, dan ditutup, yang disusun secara bertahap. Pilihan kata tersebut membentuk kesan bahwa penutupan program studi bukan merupakan keputusan yang dilakukan secara tiba-tiba, melainkan melalui proses evaluasi yang sistematis. Menurut Machin dan Mayr (2017), strategi leksikal semacam ini digunakan untuk membangun legitimasi terhadap suatu tindakan sehingga keputusan yang diambil tampak rasional dan dapat diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, penggunaan ketiga verba tersebut tidak hanya menjelaskan prosedur evaluasi, tetapi juga membangun citra bahwa kebijakan pemerintah dilandasi oleh pertimbangan yang objektif.

Ideologi dalam pernyataan tersebut semakin terlihat melalui frasa "tidak relevan dengan kebutuhan industri." Frasa tersebut menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan

suatu program studi dikaitkan dengan tingkat kesesuaiannya terhadap kebutuhan dunia kerja. Fairclough (2015) menyatakan bahwa pilihan kosakata dalam suatu wacana berfungsi membentuk representasi terhadap realitas sosial. Dalam konteks ini, penggunaan kata relevan mengarahkan masyarakat untuk memandang bahwa nilai suatu program studi ditentukan oleh kontribusinya terhadap kebutuhan industri. Akibatnya, fungsi pendidikan tinggi dipersempit sebagai penyedia sumber daya manusia bagi pasar kerja, padahal perguruan tinggi juga memiliki fungsi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, kebudayaan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Selain pilihan diksi, penggunaan modalitas "perlu" pada kalimat "program studi perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup" juga memiliki makna yang penting. Kata perlu menunjukkan bahwa tindakan tersebut diposisikan sebagai suatu kebutuhan, bukan sekadar pilihan kebijakan. Haryatmoko (2016) menjelaskan bahwa penggunaan bahasa tertentu dapat membentuk penerimaan masyarakat terhadap suatu kebijakan karena bahasa mampu menghadirkan suatu tindakan sebagai sesuatu yang wajar. Oleh karena itu, modalitas yang digunakan dalam tuturan tersebut berfungsi memperkuat legitimasi pemerintah dalam melakukan evaluasi terhadap program studi.

Penggunaan pronomina "kita" juga menarik untuk dikaji. Secara kebahasaan, kata kita merupakan pronomina inklusif yang melibatkan penutur dan pendengar dalam satu kelompok. Namun, dalam konteks pernyataan tersebut, penggunaan kata kita memberikan kesan bahwa evaluasi program studi merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya keputusan pemerintah. Strategi ini menjadikan masyarakat seolah-olah ikut terlibat dalam gagasan yang disampaikan sehingga kebijakan tampak lebih mudah diterima. Menurut Gee (2015), penggunaan pronomina dalam suatu wacana berfungsi membangun identitas sosial sekaligus menciptakan kedekatan antara penutur dengan audiens.

Berdasarkan analisis tersebut, dimensi teks menunjukkan bahwa pemilihan diksi, modalitas, dan pronomina dalam pernyataan Badri Munir Sukoco tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi mengenai evaluasi program studi, tetapi juga membangun ideologi pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan industri. Melalui penggunaan bahasa yang sistematis, pemerintah membangun legitimasi terhadap

kebijakan yang diusulkan sekaligus membentuk cara pandang masyarakat mengenai arah pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia.

2. Analisis Praktik Diskursif (*Discursive Practice*)

Analisis praktik diskursif berfokus pada proses produksi, penyebaran, dan penerimaan suatu wacana dalam masyarakat. Menurut Fairclough (2015), sebuah wacana tidak hanya dipahami melalui isi teks, tetapi juga melalui proses bagaimana teks tersebut diproduksi oleh penutur, didistribusikan melalui berbagai media, serta diinterpretasikan oleh khalayak. Oleh karena itu, analisis praktik diskursif dalam penelitian ini diarahkan untuk mengetahui bagaimana pernyataan Badri Munir Sukoco membangun legitimasi terhadap kebijakan pendidikan tinggi.

Pernyataan mengenai penghapusan program studi disampaikan oleh Badri Munir Sukoco sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026. Posisi tersebut memberikan otoritas yang kuat terhadap informasi yang disampaikan karena pembicara mewakili institusi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam penyusunan kebijakan pendidikan tinggi. Haryatmoko (2016) menjelaskan bahwa kedudukan sosial penutur memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu wacana. Semakin tinggi posisi penutur, semakin besar pula peluang wacana tersebut diterima sebagai dasar dalam memahami suatu persoalan.

Selain diproduksi oleh pejabat pemerintah, wacana tersebut juga didistribusikan melalui berbagai media massa dan media daring sehingga jangkauannya menjadi lebih luas. Pemberitaan media umumnya menonjolkan frasa "penghapusan program studi" sebagai judul utama sehingga perhatian masyarakat lebih terfokus pada kemungkinan penutupan program studi dibandingkan dengan penjelasan mengenai evaluasi yang menjadi konteks pernyataan tersebut. Paltridge (2017) menjelaskan bahwa media tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga berperan dalam membentuk makna melalui cara suatu peristiwa dikonstruksi dan disajikan kepada publik. Dengan demikian, proses distribusi wacana turut memengaruhi cara masyarakat memahami kebijakan yang sedang dibahas.

Proses konsumsi wacana menunjukkan munculnya beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian pihak menilai bahwa evaluasi program studi merupakan langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas lulusan agar sesuai dengan

kebutuhan dunia kerja. Di sisi lain, terdapat pula tanggapan yang mengkhawatirkan bahwa kebijakan tersebut dapat mengurangi keberagaman disiplin ilmu dan mempersempit fungsi perguruan tinggi menjadi penyedia tenaga kerja bagi industri. Perbedaan respons tersebut menunjukkan bahwa makna suatu wacana tidak hanya ditentukan oleh penutur, tetapi juga dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan kepentingan masing-masing pembaca maupun pendengar (Fairclough, 2015).

Apabila dikaji melalui AWK, proses produksi, distribusi, dan konsumsi wacana tersebut memperlihatkan adanya upaya membangun legitimasi terhadap kebijakan pemerintah. Bahasa yang digunakan tidak hanya menyampaikan informasi mengenai evaluasi program studi, tetapi juga membentuk pemahaman bahwa penyesuaian pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri merupakan langkah yang rasional dan diperlukan. Dengan demikian, praktik diskursif menunjukkan bahwa keberhasilan suatu wacana tidak hanya ditentukan oleh isi teks, tetapi juga oleh proses penyebaran dan penerimaan wacana tersebut dalam ruang publik.

3. Analisis Praktik Sosial (*Social Practice*)

Analisis praktik sosial bertujuan menjelaskan hubungan antara wacana dengan kondisi sosial yang melatarbelakanginya. Fairclough (2015) menyatakan bahwa setiap wacana lahir dalam konteks sosial tertentu sehingga maknanya tidak dapat dipisahkan dari situasi politik, ekonomi, maupun budaya yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, pernyataan Badri Munir Sukoco perlu dipahami sebagai bagian dari wacana kebijakan pendidikan tinggi yang berkembang di Indonesia.

Pernyataan mengenai penghapusan program studi menunjukkan adanya kecenderungan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi diarahkan untuk menyesuaikan kebutuhan dunia industri. Perguruan tinggi dipandang sebagai institusi yang bertugas menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan perkembangan pasar kerja. Pandangan tersebut mencerminkan orientasi pendidikan yang menempatkan aspek ekonomi sebagai salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan pendidikan. Fairclough (2015) menjelaskan bahwa ideologi dalam suatu wacana bekerja melalui proses naturalisasi, yaitu menghadirkan suatu cara pandang sebagai sesuatu yang wajar dan layak diterima oleh masyarakat.

Di sisi lain, kebijakan tersebut juga memperlihatkan adanya relasi kekuasaan antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan perguruan tinggi sebagai pelaksana kebijakan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan standar, melakukan evaluasi, serta menentukan keberlanjutan suatu program studi. Haryatmoko (2016) menjelaskan bahwa kekuasaan dalam wacana tidak selalu diwujudkan melalui tindakan yang bersifat memaksa, tetapi juga melalui penggunaan bahasa yang mampu membangun persetujuan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Dengan demikian, relasi kekuasaan dalam pernyataan tersebut dibangun melalui argumentasi yang menekankan efisiensi, relevansi, dan kebutuhan industri sebagai dasar pengambilan keputusan.

Analisis praktik sosial juga menunjukkan bahwa wacana tersebut mencerminkan perubahan paradigma mengenai fungsi pendidikan tinggi. Perguruan tinggi tidak lagi dipandang hanya sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai institusi yang harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan ekonomi nasional. Pergeseran paradigma tersebut memperlihatkan bagaimana kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh perubahan kondisi sosial dan tuntutan global yang menekankan pentingnya daya saing sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil analisis pada dimensi praktik sosial dapat dipahami bahwa pernyataan Badri Munir Sukoco tidak hanya membahas evaluasi program studi, tetapi juga merepresentasikan ideologi mengenai arah pembangunan pendidikan tinggi di Indonesia. Melalui penggunaan bahasa yang sistematis, pemerintah membangun legitimasi terhadap kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan industri sekaligus memperlihatkan relasi kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, AWK menunjukkan bahwa bahasa menjadi instrumen penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap kebijakan pendidikan tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan Badri Munir Sukoco mengenai penghapusan program studi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri mengandung representasi ideologi dan relasi kekuasaan yang dibangun melalui penggunaan bahasa. Berdasarkan dimensi analisis teks, penggunaan diksi seperti *pilih*, *pilah*, *ditutup*, serta frasa *tidak relevan dengan kebutuhan industri*

menunjukkan upaya membangun pemahaman bahwa evaluasi program studi merupakan langkah yang rasional dan diperlukan. Pilihan bahasa tersebut juga merepresentasikan orientasi pendidikan tinggi yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dunia industri. Berdasarkan dimensi praktik diskursif, pernyataan tersebut diproduksi oleh pejabat pemerintah yang memiliki otoritas dalam bidang pendidikan tinggi dan disebarluaskan melalui berbagai media sehingga memperoleh perhatian luas dari masyarakat. Posisi penutur sebagai representasi pemerintah memberikan legitimasi terhadap wacana yang disampaikan, sedangkan proses penyebaran melalui media turut memengaruhi cara masyarakat memahami kebijakan tersebut. Selanjutnya, berdasarkan dimensi praktik sosial, penelitian ini menunjukkan bahwa wacana mengenai penghapusan program studi tidak hanya berkaitan dengan evaluasi akademik, tetapi juga merepresentasikan arah kebijakan pendidikan tinggi yang semakin menekankan keterkaitan antara perguruan tinggi dan kebutuhan industri. Relasi kekuasaan terlihat melalui kewenangan pemerintah dalam membangun serta mengarahkan pemahaman masyarakat mengenai tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dengan demikian, AWK mampu mengungkap bahwa bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana membangun ideologi dan legitimasi terhadap suatu kebijakan publik.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji wacana kebijakan pendidikan menggunakan AWK. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian linguistik, khususnya mengenai hubungan antara bahasa, ideologi, dan kekuasaan dalam komunikasi publik.

DAFTAR RUJUKAN

- Akhmaloka, A., Sukoco, B. M., dkk. (2023). Strategi peningkatan kualitas menuju perguruan tinggi berkelas dunia. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- Badri Munir Sukoco. (2026, April 23). Pernyataan mengenai penataan program studi yang tidak relevan dengan kebutuhan industri. ANTARA News.
- Fairclough, N. (2015). *Language and Power* (3rd ed.). London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315838250>
- Gee, J. P. (2015). *Social Linguistics and Literacies: Ideology in Discourses* (5th ed.). London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315722511>

- Haryatmoko. (2016). *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis): Landasan Teori, Metodologi, dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. (2026). *Pernyataan Sekretaris Jenderal Badri Munir Sukoco pada Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026*. Jakarta: Kemdiktisaintek.
- Machin, D., & Mayr, A. (2017). *How to Do Critical Discourse Analysis: A Multimodal Introduction* (2nd ed.). London: Sage Publications.
- Maylinda, E., & Agyansa, A. O. (2025). Perkembangan analisis wacana kritis terhadap kebijakan: Tinjauan pustaka sistematis dan analisis bibliometrik. *Jejaring Administrasi Publik*, 17(2), 170–194. <https://doi.org/10.20473/jap.v17i2.84411>
- Paltridge, B. (2017). *Discourse Analysis: An Introduction* (3rd ed.). London: Bloomsbury Academic.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Simpson, P., Mayr, A., & Statham, S. (2019). *Language and power: A resource book for students* (2nd ed.). Routledge.
- Van Dijk, T. A. (2015). *Discourse and Knowledge: A Sociocognitive Approach*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CB09781107775404>
- Wodak, R., & Meyer, M. (Eds.). (2016). *Methods of Critical Discourse Analysis* (3rd ed.). London: Sage Publications. <https://doi.org/10.4135/9781473953468>
- Yudistira, Y., Mahsun, M., Sirulhaq, A., Saharudin, S., & Setiawan, I. (2026). Ideologi pendidikan dalam profil lulusan 8 dimensi: Analisis wacana kritis Norman Fairclough terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 10 Tahun 2025. *GeoScienceEd Journal*, 6(2).